



News Title : Sepanjang 2023, Bappebti: 1.855 Situs PBK Ilegal Telah Diblokir	
Media Name : suarainvestor.com	Journalist : Iwan Damiri
Publish Date : 01 February 2024	Tonality : Positive
News Page : 1	News Value : 1,500,000
Resources : Kasan (Plt. Kepala Bappebti)	Ads Value : 500,000
Section/Rubrication : Market	Topic : Blokir Domain Situs Web Situs Ilegal

MARKET

Sepanjang 2023, Bappebti: 1.855 Situs PBK Ilegal Telah Diblokir



ILUSTRASI/SUMBER FOTO: DOK BAPPEBTI

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) telah memblokir 1.855 situs web ilegal bidang **Perdagangan Berjangka Komoditi** (PBK) sepanjang 2023. Langkah pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK. "Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar," kata Plt. Kepala Bappebti, **Kasan** di Jakarta, Kamis, (1/2/2024).

Lebih jauh Kasan menambahkan Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal. Bahwa masyarakat dapat berperan aktif untuk melaporkan ke Bappebti melalui saluran media sosial atau datang langsung bila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK. "Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK. Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan **Aldison** menegaskan, setiap pihak yang melakukan kegiatan PBK di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. "Entitas yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," ujar Aldison.

Situs web PBK ilegal yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bappebti dapat dilakukan normalisasi apabila entitas pemilik situs web tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat.***